

**AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DESA: STUDI KASUS PERAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA NGLANDUNG
KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagai salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos.) dalam bidang Ilmu Politik



Faten A'laa

NIM 100401200080

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2024**

Pernyataan Pertanggungjawaban Penulisan Skripsi

Bismillahirrahmanirrahim, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Faten A'laa

NIM : 10040120080

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : *“Akuntabilitas Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan
Desa: Studi Kasus Peran Badan Permusyawaratan Desa
Di Desa Nglandung Kabupaten Madiun”*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada Lembaga Pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti sebagai karya plagiat, maka saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang berlaku.

Surabaya, 28 Juni 2024


METERAL TEMPEL
4CCAKX592834923
Faten A'laa
10040120080

Persetujuan Dosen Pembimbing

Setelah melaksanakan bimbingan dan koreksi pada skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Faten A'laa

Nim : 10040120080

Program Studi : Ilmu Politik

Berjudul “*Akuntabilitas Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa: Studi Kasus Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Nglandung Kabupaten Madiun*”, saya berasumsi bahwasannya skripsi tersebut dapat diujikan agar mahasiswa yang bersangkutan memperoleh izin untuk melanjutkan ketahap penelitian skripsi.

Surabaya, 20 Juni 2024

Dosen Pembimbing,



Dr. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP 19690907994322001

Lembar Pengesahan

Skripsi oleh Faten A'laa dengan judul "Akuntabilitas Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa: Studi Kasus Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Nglandung Kabupaten Madiun" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus oleh Tim penguji Skripsi pada Tanggal 26 Juni 2024

Tim Penguji Skripsi

Dosen Pembimbing



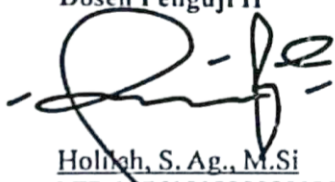
Dr Aniek Nurhayati, M. Si
NIP:196909071994032001

Dosen Penguji I



Dr. Iva Yulianti Umdatul Izzah, S. Sos, M. Si
NIP:197607182008012022

Dosen Penguji II



Holahh, S. Ag., M.Si
NIP:197610182008012008

Dosen Penguji III



Ajeng Widya Prakasita, M.A.
NIP:199502232020122025

Surabaya, 26 Juni 2024

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M. Ag
NIP: 197306272000031003



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ften A'laa
NIM : 10040120080
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
E-mail address : 10040120080@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Akuntabilitas Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa : Studi Kasus Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Nglandung Kabupaten Madiun

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Agustus 2024

Penulis

(Faten A'laa)

ABSTRACT

A'laa, Faten. “Akuntabilitas Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa: Studi Kasus Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Ngkandung Kabupaten Madiun”. Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024.

The aim of this research is to analyze the role of the Village Correctional Agency (BPD) in public accountability in village governance. This research is important to provide an overview of public accountability practices at the village level, as well as the important role that BPD can play in realizing village governance that is in accordance with the principles of *good governance*, transparent and participatory to the community. This research uses a qualitative-descriptive research methodology with data collection techniques through observation, documentation studies and in-depth interviews. Data analysis techniques consist of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Research participants were members of the BPD, village officials and the people of Ngkandung Village. This research was analyzed using the theory of public accountability by Lawrence C Howard and Jerome B McKinney in terms of dimensions of accountability, mechanisms, challenges, and the balance between power and accountability. Public accountability theory helps understand the importance of balancing power and accountability. Based on data in the field, researchers found that the Village Consultative Body is a working partner of village officials and has implemented several roles in public accountability, especially in terms of public participation and taking part in all planning, implementation and village development, always prioritizing a neutral attitude in carrying out its role. as an institution that accommodates community aspirations even though it has not implemented the principle of transparency and there are many challenges and obstacles due to limited human resources.

Keywords: *public accountability, governance, Village Consultative Body*

ABSTRAK

A'laa, Faten. “Akuntabilitas Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa: Studi Kasus Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Nglandung Kabupaten Madiun”. Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran Badan Pemasarakatan Desa (BPD) terhadap akuntabilitas publik dalam tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran mengenai praktik akuntabilitas publik di tingkat desa, serta peran penting yang dapat dimainkan oleh BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang sesuai dengan prinsip *good governance*, transparan, dan partisipatif kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam. Teknik Analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Partisipan penelitian adalah anggota BPD, perangkat desa, dan masyarakat Desa Nglandung. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori akuntabilitas publik oleh Lawrence C Howard dan Jerome B McKinney dari segi dimensi akuntabilitas, mekanisme, tantangan, serta keseimbangan antara kekuasaan dengan akuntabilitas. Teori akuntabilitas publik membantu memahami pentingnya keseimbangan kekuasaan dan akuntabilitas. Berdasarkan data di lapangan, peneliti menemukan bahwasannya Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja dari perangkat desa dan telah menerapkan beberapa perannya dalam akuntabilitas publik terutama dalam hal partisipatif publik dan ikut andil dalam segala perencanaan, pelaksanaan, dan Pembangunan desa, selalu mengedepankan sikap netral dalam menjalankan perannya sebagai Lembaga yang menampung aspirasi masyarakat meskipun belum melaksanakan prinsip transparansi serta terdapat banyak tantangan dan kendala pada keterbatasan SDM.

Kata Kunci: *akuntabilitas publik, tata kelola, Badan Permusyawaratan Desa*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

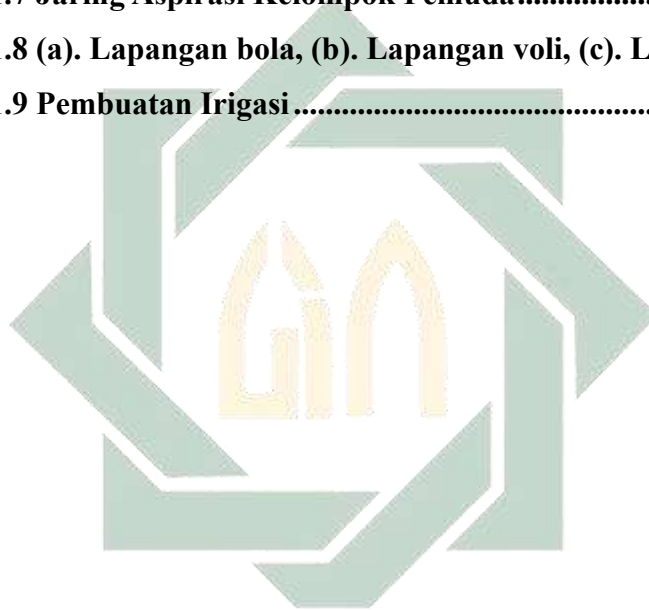
Persetujuan Dosen Pembimbing.....	ii
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat penelitian.....	11
2. Manfaat Praktis.....	11
3. Manfaat Akademis.....	11
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	23
BAB II	25
TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Teori Akuntabilitas Publik	25
a. Definisi Akuntabilitas	26
b. Dimensi Akuntabilitas.....	26
c. Mekanisme Akuntabilitas	26
d. Tantangan Akuntabilitas	27

e. Keseimbangan Kekuasaan dan Akuntabilitas	27
B. Argumentasi Utama	30
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Dan Problem Penelitian	31
B. Unit Dan Peringkat Analisis.....	32
C. Situasi Sosial, Sampel, Dan Teknik Sampling	33
1. Situasi sosial	33
2. Sampel	33
3. Teknik Sampling.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
1. Metode Observasi	37
2. Metode Wawancara.....	38
3. Metode Dokumentasi	39
E. Teknik Analisis Data	39
1. Reduksi Data	40
2. Penyajian Data (Display Data)	40
3. Penarikan Kesimpulan (Verifying Conclusion).....	41
F. Teknik Validasi Data	42
BAB IV	43
HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Deskripsi Lokasi.....	43
1. Kondisi Geografis	43
2. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa.....	47
3. Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan Desa.....	49

B. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Akuntabilitas Publik ...	52
1. Peran Legislatif BPD	52
2. Peran Audit Dan Evaluasi	58
3. Peran BPD Dalam Transparansi Dan Partisipasi Publik	64
4. Tantangan BPD Dalam Akuntabilitas Publik.....	75
a. Keterbatasan Sumber Daya.....	75
b. Desentralisasi Kekuasaan	79
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	91
A. Transkrip Wawancara.....	91
1. Drs. Ahmad Pamuji (Kepala Desa).....	91
2. Risa Suci Amalia (Fatayat-masyarakat).....	92
3. Harsono (Sekretaris Desa).....	93
4. Agus Santoso (Ketua BPD).....	93
5. Kuswan Taufiq (Sekretaris BPD).....	95
6. Sukri Masyarakat (petani)	96
7. Alif Sanjaya Masyarakat (Pemuda)	96
B. Lampiran Dokumentasi.....	97
.....	97
C. Lampiran Surat Keterangan Lulus Plagiasi	101
.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Madiun	44
Gambar 1.2 Peta Kecamatan Geger	45
Gambar 1.3. Peta Desa Nglandung	46
Gambar 1.4. Struktur Kepengurusan BPD.....	49
Gambar 1.5 Perbaikan Jalan.....	63
Gambar 1.6 Musyawarah Desa	65
Gambar 1.7 Jaring Aspirasi Kelompok Pemuda.....	70
Gambar 1.8 (a). Lapangan bola, (b). Lapangan voli, (c). Lapangan voli... 	72
Gambar 1.9 Pembuatan Irigasi.....	73



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

(<https://geger.madiunkab.go.id/desa/> , diakses pada 29 Mei 2024 pukul 12.31 WIB)

(<https://pakatto.digitaldesa.id/berita/musyawarah-perencanaan-pembangunan-desa-musrembang-desa-tahun-anggran-2024-> , diakses pada 10 Juni 2024)

(<https://peraturan.bpk.go.id/Details/101009/pp-no-3-tahun-2019>, diakses pada 29 Mei 2024)

(<https://pn-madiunkab.go.id/wilayah-yuridiksi/> , diakses pada 29 Mei 2024 pukul 12.19 WIB)

Apriliani, E. (2023). *Peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penerapan nilai Good Governance (Studi di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa)* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).

Arifin, Z. (2020). Metodologi penelitian pendidikan. *Jurnal Al-Hikmah*, 1(1).

Averus, A., & Alfina, D. (2020). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 585-610.

Bagong Suyatno, *Metode Penelitian Social: Berbagai Alternaltive Pendekatan*, (Jakarta: Kencana Prenaa Mmedia Grroup, 2005). Hlm.172.

Bagong Suyatno, *Metode Penelitian Social: Berbagai Alternaltive Pendekatan*, (Jakarta: Kencana Prenaa Mmedia Grroup, 2005). hlm 172.

Bapak Agus Susanto, Wawancara dengan Ketua BPD Desa Nglandung, 14 Mei 2024.

Bapak Harsono, wawancara dengan Sekretaris Desa Nglandung, 13 Mei 2024.

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 16.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitataif*, (Jakkarta: Kencana, 2010), Hlm. 256.

Data Sekretaris Desa Nglandung

Desa, sibermata, <https://sibermatadesa.dpmd.jatimprov.go.id/uploads/regulasi/57.%20Permendagri%20110-2016%20ttg%20BPD.pdf> /diakses pada 03 Juni 2024.

Dwinugraha, A. P. (2020). Kepemimpinan politik kepala desa. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 5(2), 117.

Haris Hherdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), Hlm. 118.

Haryati, H., Pujiono, P., Nuswantara, D. A., Yanthi, M. D., & Siregar, C. S. (2023). Pendampingan Penyusunan Program Kerja BPD dalam Meningkatkan Akuntabilitas Desa. *Abimanyu: Journal of Community Engagement*, 4(1), 9-14.

Howard, L. C., & McKinney, J. B. (1998). *Public administration: Balancing power and accountability*. Bloomsbury Publishing USA, hal. 463.

<https://radarmadura.jawapos.com/nasional/74894930/eks-kades-dasok-mulai-disidang-terdakwa-kasus-korupsi-dd> diakses pada 16 Juni 2024 pukul 21.02

Khoiruddin, M. I. (2023). Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Tremas Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Jawa Timur).

Kurniasih, D., Wijaya, S. S., & Setyoko, P. I. (2019, October). Public Governance in Accountability of Village Enterprise (BUMDes) Management: a Stakeholders Perspective. In *Iapa Proceedings Conference* (pp. 180-191).

Kuswan Taufiq, wawancara dengan sekretaris BPD, pada 16 Mei 2024.

Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33-39.

- Maharani, A. E. P., & Prehantoro, F. Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengawasan Pemerintahan Desa Untuk Mencapai Good Government Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *RES PUBLICA*, 1(2), 110-132.
- Maslikan, M., & Jimantoro, A. (2020). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Keadilan Hukum*, 1(2), 6-12.
- Mokosuli, S. V., Kaawoan, J. E., & Waworundeng, W. (2022). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengawasan Pemerintahan Dan Pembangunan Di Desa Lobu Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Ningrum, E., & Hariadi, W. (2022). Fungsi Dan Kedudukan Kelembagaan Pemerintahan Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*.
- Nugraha, I. G. M. B., Suryawan, I. G. B., & Arthanaya, I. W. (2021). Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Lembaga Pengawas Terhadap Kinerja Kepala Desa di Dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 584-589.
- Nurlinah, N. (2019). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 108-115.
- Perda Kabupaten Madiun no. 9 tthn 2018 tentang pemerintahan desa, hlm. 17
- Pratama, A. K., Badaruddin, B., & Kadir, A. (2021). Peran BPD dalam Pengawasan Dana Desa. *PpERSPEKTIF*, 10(2), 371-382.
- Puspitarini, F. (2021). *Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa*

Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Rusmianto, R., & Maryani, M. (2022). Pengembangan Model Good Governance Pemerintahan Desa Melalui Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 559-566.

Setiono, B., & Barkah, A. (2020). Public accountability under neoliberal domination: The case of Kulon Progo. In *Public Sector Accountants and Quantum Leap: How Far We Can Survive in Industrial Revolution 4.0?* (pp. 169-173). Routledge.

Sugiyono, M. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran* (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 277.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineke Cipta, 2002), Hlm. 133.

Suryanata, L. A., Rusnan, R., & Koynja, J. J. (2023). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Diskresi*, 2(2).

Wawancara bersama Alif Sanjaya selaku kelompok pemuda desa Nglandung, pada 17 Mei 2024.

Wawancara bersama Bapak Pamuji selaku Kepala Desa, 13 Mei 2024.

Wawancara Bersama Bapak Sutrisno selaku anggota BPD, pada tanggal 15 Mei 2024.

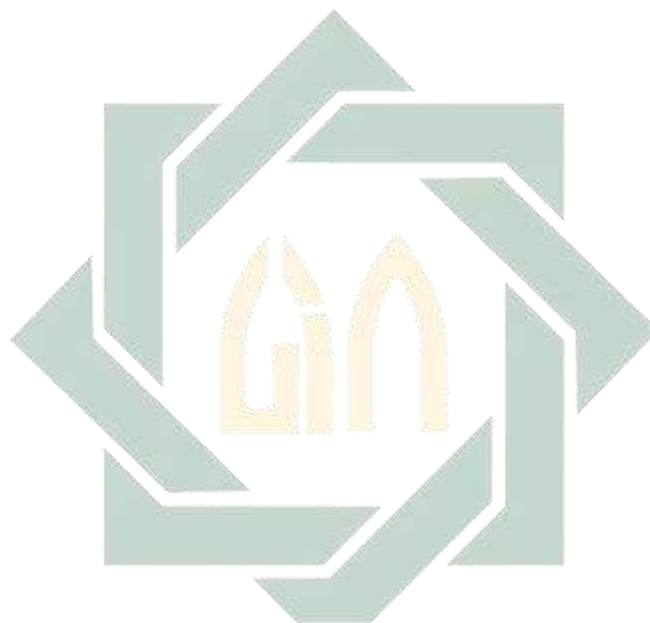
Wawancara dengan Bapak Sukri selaku kelompok tani, pada 18 Mei 2024.

Wawancara dengan ketua BPD Bapak Agus secara Offline pada 29 Mei 2024

Wawancara dengan pemuda Alif Sanjaya secara offline pada 30 Mei 2024

Wijaya, R., & Septiana, R (2022). Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perspektif Demokrasi (Studi Pada Bpd Desa Karyamulyasari Kecamatan Candipuro Lampung Selatan). Mahadi: Indonesia Journal Of Law, 1(1), 125-139.

Yuwafik, M. H. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mendorong Good Governance Di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Jurnal Politique, 1(1), 18-38.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A